

AUDIT SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PENATAUSAHAAN DI BAGIAN PEMBAYARAN LANGSUNG PADA KANTOR SAMSAT KELAPA DUA TANGERANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5

Sigit Auliana¹, Shinta Nuriyah²

pasigit@gmail.com¹, shinta.nuriyah1128@gmail.com²

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini dilakukan di Samsat Kelapa Dua Tangerang untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan dalam pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja. SIPD Penatausahaan, yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun sistem ini telah diterapkan, masih terdapat tantangan seperti adaptasi pegawai terhadap sistem baru, pengelolaan data yang efektif, dan validitas laporan keuangan. Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk memahami kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi guna mengoptimalkan penggunaan SIPD Penatausahaan di lingkungan Samsat.

Kata Kunci: SIPD Penatausahaan, Pelaporan Keuangan Daerah, Samsat Kelapa Dua Tangerang.

PENDAHULUAN

Samsat Kelapa Dua Tangerang adalah kantor pelayanan pajak daerah yang melayani masyarakat dalam urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penerbitan dokumen kendaraan. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Samsat memiliki tanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Untuk memastikan keuangan dikelola dengan baik, Samsat Kelapa Dua Tangerang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan dalam pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja. Aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah daerah mencatat dan mengelola anggaran dengan lebih rapi dan transparan. Dengan SIPD Penatausahaan, laporan keuangan bisa dibuat lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan evaluasi kinerja keuangan Samsat serta memastikan anggaran digunakan dengan efisien.

Meskipun sistem ini sudah diterapkan, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti bagaimana pegawai menyesuaikan diri dengan sistem baru, bagaimana data dapat dikelola dengan baik, serta apakah laporan yang dihasilkan benar-benar efektif. Oleh karena itu, melalui Kuliah Kerja Praktek ini, kami ingin memahami lebih dalam bagaimana penggunaan SIPD Penatausahaan di Samsat Kelapa Dua Tangerang, melihat kendala yang ada, dan mencari cara agar sistem ini dapat digunakan dengan lebih maksimal.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menganalisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan dibagian Pembayaran Langsung (LS) Pada Samsat Kelapa Dua Tangerang. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh informasi mendalam mengenai proses input Pembayaran Langsung (LS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. (Fhonna & Ar, 2021)

Sistem adalah kumpulan atau serangkaian komponen yang saling terikat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Rizqya, 2020)

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Nurul Wahidah dkk., 2022)

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan pendekatan sistem kita berhubungan dengan perseorangan, dan kita lebih menekankan perannya di dalam sistem dari pada perannya sebagai suatu keseluruhan individu. (Hudin dkk., 2021)

Sistem dapat disimpulkan kumpulan bagian-bagian prosedur atau komponen subsistem yang disatukan untuk saling berkaitan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Rahwanto & Sudaryono, 2020)

Berdasarkan definisi diatas, sistem dapat disimpulkan sebagai kumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. (Fhonna & Ar, 2021)

Informasi adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai makna bagi siapapun yang menerimanya. (Rizqya, 2020)

Informasi merupakan sesuatu yang mengandung makna yang sangat penting dalam kegiatan proses pengambilan keputusan. (Ridho, 2021)

Informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. (Nurul Wahidah dkk., 2022)

Informasi adalah data yang telah diproses dengan suatu cara untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. (Rahwanto & Sudaryono, 2020)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna, nilai, dan kegunaan bagi penerima informasi tersebut.

3. Pengertian Uml

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan membangun perangkat lunak. UML berfungsi sebagai metode dalam pengembangan sistem berbasis objek serta sebagai alat bantu dalam proses perancangan sistem. Beberapa diagram yang digunakan dalam pemodelan berbasis objek dengan UML meliputi diagram use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. (Ayu Binangkit dkk., 2023)

Tinjauan Khusus

1. Pengertian Audit Sistem Informasi

Audit Sistem Informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer melindungi aset, memelihara integritas data, memungkinkan tujuan organisasi dicapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. (Nurul Wahidah dkk., 2022)

Proses mengumpulkan dan evaluasi suatu bukti menentukan apakah sistem aplikasi terkomputerisasi menetapkan serta menerapkan sistemnya dalam pengendalian intern secara memadai, terjamin integritas datanya dan penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer secara efektif. (Hudin dkk., 2021)

Audit Sistem Informasi adalah suatu pengevaluasian untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian antara aplikasi sistem informasi dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengetahui apakah suatu sistem informasi telah didesain dan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memiliki mekanisme pengamanan aset yang memadai, serta menjamin integritas data yang memadai. (Aziz dkk., 2020)

Audit sistem informasi dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara sistem informasi dengan prosedur bisnis (business processes) perusahaan atau kebutuhan pengguna (user needs), untuk mengevaluasi apakah suatu sistem informasi telah didesain dan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memiliki mekanisme pengamanan aset, serta menjalin integritas data yang memadai. (Aziz dkk., 2020)

Audit didefinisikan sebagai pemeriksaan yang ketat dan metodis atas kesimpulan atau dokumentasi pendukung oleh spesialis internal dan/atau eksternal yang tidak memihak di bidang pelaporan dan dokumentasi pendukung dengan tujuan untuk menentukan keandalan laporan dan dokumentasi pendukung serta mengembangkan rekomendasi yang lebih kuat. Seluruh infrastruktur TI dipantau dan dikendalikan oleh audit TI. (Muhamad Sidik, 2023)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi adalah suatu proses penilaian menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut berjalan dengan baik, aman, efisien, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2. Pengertian Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Roni Yanto, 2022)

Penatausahaan merupakan pencatatan semua kegiatan kebendaharaan dan administrasi yang menyebabkan bertambah maupun berkurangnya kekayaan daerah, yaitu berupa uang atau barang serta pelaksanaan tugas-tugas transitoris dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Adyanto dkk., 2024)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan adalah kegiatan yang terdiri dari pembukuan, pendataan, pencatatan serta pelaporan. (Istighfarin & Priono, 2021)

Penatausahaan adalah proses pengelolaan dan pencatatan administrasi yang terkait dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi atau dokumen dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk memastikan keberlanjutan dan keteraturan administrasi serta memudahkan aksesibilitas dan penggunaan informasi yang diperlukan. (Waruwu dkk., 2024)

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dan terorganisir dalam mengelola aset atau sumber daya suatu organisasi, baik itu berupa barang, uang, maupun informasi.

3. Pengertian SIPD

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki definisi sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan alur kerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi di seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. (Agus Saputra & Sudianing, 2019)

Sistem Informasi Pemerintah merupakan sebuah pengembangan dari Sistem Informasi secara umum yang memiliki definisi sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi. (Agus Saputra & Sudianing, 2019)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan data secara sistematis dengan dukungan perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga pelaksana untuk menghasilkan informasi yang efisien dan efektif dalam mendukung pelayanan masyarakat.

4. Pengertian Cobit 5

COBIT 5 merupakan tahapan generasi terbaru dari sebuah panduan ISACA yang berisikan tata laksana dan manajemen IT. COBIT 5 dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COBIT selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, komunitas IT, risiko, asuransi, dan keamanan. (Jasmin dkk., 2021)

Menurut ISACA (2017) COBIT 5 adalah satu-satunya kerangka kerja untuk tata kelola dan pengelolaan Teknologi Informasi. COBIT 5 menggabungkan pemikiran terbaru dalam teknik tata kelola perusahaan dan manajemen menyediakan prinsip, praktik, alat analisis, dan model yang dapat diterima secara global untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan nilai dari sistem informasi. (Angelia dkk., 2023)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa COBIT 5 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen IT yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem informasi, berdasarkan pengalaman lebih dari 15 tahun penggunaannya.

Mapping Cobit 5 pada SIPD Penatausahaan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan ini bertujuan untuk pelaporan keuangan di beberapa instansi salah satunya adalah Uptd Samsat kelapa Dua Tangerang, domain EDM01 terpilih untuk proses audit yang lebih terperinci. Domain EDM01 sesuai untuk audit sistem informasi penatausahaan keuangan daerah karena mendukung aspek tata kelola, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, dan efisiensi sistem informasi. Dengan menerapkan EDM01, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sistem penatausahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan memenuhi regulasi yang berlaku.

Berikut ini adalah tabel pedoman Enterprise Goals untuk menentukan dan memilih domain dan proses penelitian:

Tabel 1. Enterprise Goals

<i>Figure —COBIT 5 Enterprise Goals</i>				
<i>BSC Dimension</i>	<i>Enterprise Goal</i>	<i>Relation to Governance Objectives</i>		
		<i>Benefits Realisation</i>	<i>Risk Optimisation</i>	<i>Resource Optimisation</i>

<i>Financial</i>	<i>1. Stakeholder value of business investments</i>	<i>P</i>		<i>S</i>
	<i>2. Portfolio of competitive products and services</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>S</i>
	<i>3. Managed business risk (safeguarding of assets)</i>		<i>P</i>	<i>S</i>
	<i>4. Compliance with external laws and regulations</i>		<i>P</i>	
	<i>5. Financial transparency</i>	<i>P</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
<i>Customer</i>	<i>6. Customer-oriented service culture</i>	<i>P</i>		<i>S</i>
	<i>7. Business service continuity and availability</i>		<i>P</i>	
	<i>8. Agile responses to a changing business environment</i>	<i>P</i>		<i>S</i>
	<i>9. Information-based strategic decision making</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
	<i>10. Optimisation of service delivery costs</i>	<i>P</i>		<i>P</i>
<i>Internal</i>	<i>11. Optimisation of business process functionality</i>	<i>P</i>		<i>P</i>
	<i>12. Optimisation of business process costs</i>	<i>P</i>		<i>P</i>
	<i>13. Managed business change programmes</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>S</i>
	<i>14. Operational and staff productivity</i>	<i>P</i>		<i>P</i>

	<i>15. Compliance with internal policies</i>		<i>P</i>	
<i>Learning and Growth</i>	<i>16. Skilled and motivated people</i>	<i>S</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
	<i>17. Product and business innovation culture</i>	<i>P</i>		

Berikut ini adalah tabel pedoman IT-Related Goals untuk menentukan dan memilih domain dan proses penelitian.

Tabel 2. IT-related Goals

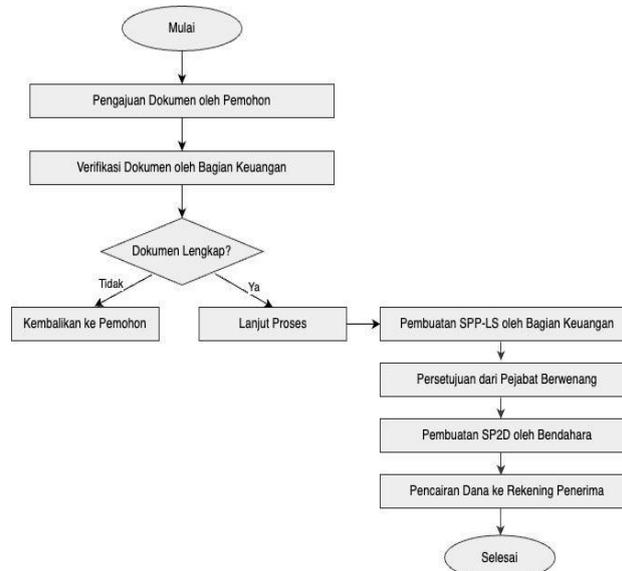
Figure 5—IT-related Goals		
IT BSC Dimension	Information and Related Technology Goal	
<i>Financial</i>	<i>01</i>	<i>Alignment of IT and business strategy</i>
	<i>02</i>	<i>IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations</i>
	<i>03</i>	<i>Commitment of executive management for making IT-related decisions</i>
	<i>04</i>	<i>Managed IT-related business risk</i>
	<i>05</i>	<i>Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio</i>
	<i>06</i>	<i>Transparency of IT costs, benefits and risk</i>
<i>Customer</i>	<i>07</i>	<i>Delivery of IT services in line with business requirements</i>
	<i>08</i>	<i>Adequate use of applications, information and technology solutions</i>
<i>Internal</i>	<i>09</i>	<i>IT agility</i>
	<i>10</i>	<i>Security of information, processing infrastructure and applications</i>
	<i>11</i>	<i>Optimisation of IT assets, resources and capabilities</i>
	<i>12</i>	<i>Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes</i>
	<i>13</i>	<i>Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards</i>
	<i>14</i>	<i>Availability of reliable and useful information for decision making</i>
	<i>15</i>	<i>IT compliance with internal policies</i>

<i>Learning and Growth</i>	16	<i>Competent and motivated business and IT personnel</i>
	17	<i>Knowledge, expertise and initiatives for business innovation</i>

Flowchart dan UML

Flowchart

Berikut adalah flowchart SIPD Penatausahaan Pembayaran Langsung (LS) yang berjalan:



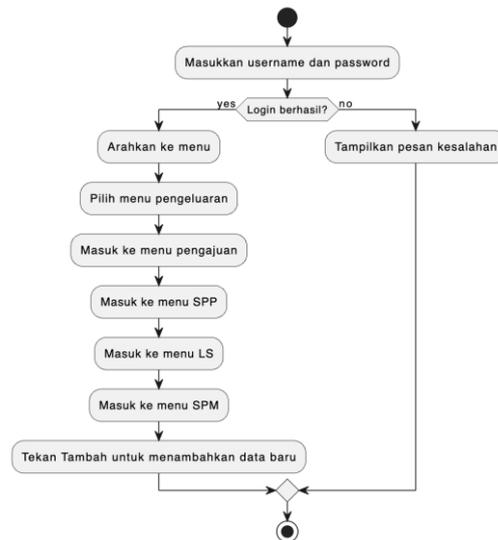
Gambar 1. Flowchart SIPD Penatausahaan

UML

Berikut ini adalah uml pada proses sistem yang berjalan pada SIPD Penatausahaan dalam Pembayaran Langsung (LS):



Gambar 2. Use Case SIPD Penatausahaan



Gambar 3. Activity Diagram pembuatan LS

Hasil Pemetaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui untuk mencapai tujuan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan yang efektif maka Enterprise Goals yang dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. IT-Related Goals terpilih

<i>Figure —COBIT 5 Enterprise Goals</i>				
<i>BSC Dimension</i>	<i>Enterprise Goal</i>	<i>Relation to Governance Objectives</i>		
		<i>Benefits Realisation</i>	<i>Risk Optimisation</i>	<i>Resource Optimisation</i>
<i>Financial</i>	<i>5. Financial transparency</i>	<i>P</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
<i>Customer</i>	<i>10. Optimisation of service delivery costs</i>	<i>P</i>		<i>P</i>
<i>Internal</i>	<i>11. Optimisation of business process functionality</i>	<i>P</i>		<i>P</i>
	<i>12. Optimisation of business process costs</i>	<i>P</i>		<i>P</i>
	<i>15. Compliance with internal policies</i>		<i>P</i>	
<i>Learning and Growth</i>	<i>16. Skilled and motivated people</i>	<i>S</i>	<i>P</i>	<i>P</i>

Selanjutnya Enterprise goals tersebut akan dihubungkan dengan IT-Related Goals yang sesuai. Hasil Pemetaan Enterprise goals dengan IT-Related Goals dapat dilihat pada gambar berikut:

Figure 17—Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals

		Enterprise Goal																
		1. Stakeholder value of business investments	2. Portfolio of competitive products and services	3. Managed business risk (safeguarding of assets)	4. Compliance with external laws and regulations	5. Financial transparency	6. Customer-oriented service culture	7. Business service continuity and availability	8. Agile responses to a changing business environment	9. Information-based strategic decision making	10. Optimisation of service delivery costs	11. Optimisation of business process functionality	12. Optimisation of business process costs	13. Managed business change programmes	14. Operational and staff productivity	15. Compliance with internal policies	16. Skilled and motivated people	17. Product and business innovation culture
IT-related Goal		Financial				Customer				Internal				Learning and Growth				
Financial	01 Alignment of IT and business strategy	P	P	S			P	S	P	P	S	P	S	P			S	S
	02 IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations			S	P											P		
	03 Commitment of executive management for making IT-related decisions	P	S	S				S	S		S		P				S	S
	04 Managed IT-related business risk			P	S			P	S		P		S			S	S	
	05 Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	P	P				S	S		S	S	P		S				S
	06 Transparency of IT costs, benefits and risk	S		S		P				S	P		P					
Customer	07 Delivery of IT services in line with business requirements	P	P	S	S		P	S	P	S		P	S	S			S	S
	08 Adequate use of applications, information and technology solutions	S	S	S			S	S		S	S	P	S		P		S	S
Internal	09 IT agility	S	P	S			S		P			P	S	S			S	P
	10 Security of information, processing infrastructure and applications			P	P			P								P		
	11 Optimisation of IT assets, resources and capabilities	P	S					S		P	S	P	S	S				S
	12 Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	S	P	S			S	S		S	P	S	S	S				S
	13 Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	P	S	S			S			S		S	P					
	14 Availability of reliable and useful information for decision making	S	S	S	S			P		P		S						
Learning and Growth	15 IT compliance with internal policies			S	S											P		
	16 Competent and motivated business and IT personnel	S	S	P			S	S							P		P	S
	17 Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	S	P				S		P	S		S	S				S	P

Gambar 4. Pemetaan Enterprise goals dengan IT-Related Goals

Jika dilihat dari gambar diatas IT-Related Goals yang sesuai dengan pemetaan Enterprise goals yang terpilih berlabelkan “P” yang artinya diprioritaskan untuk dipilih.

Reporting dan Resulting

Berikut ini adalah temuan dan rekomendasi untuk memperbaiki gap yang ada:

Tabel 5. Temuan dan Rekomendasi

Temuan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none"> Proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya otomatis sehingga masih ada potensi kesalahan manusia (human error). Beberapa alur kerja masih memerlukan verifikasi manual, sehingga memperlambat proses pencairan dana. Kurangnya mekanisme backup dan pemulihan data yang cepat jika terjadi gangguan sistem. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan fitur audit trail yang mencatat setiap aktivitas pengguna dalam sistem Mengotomatisasi proses verifikasi dokumen untuk mengurangi waktu tunggu dalam pencairan dana. Memperbaiki kebijakan backup data dengan memastikan adanya sistem pemulihan darurat untuk mengurangi resiko kehilangan data

KESIMPULAN

Sistem SIPD Penatausahaan saat ini sudah cukup membantu dalam mengelola keuangan daerah, tetapi masih ada beberapa kendala yang membuatnya kurang efisien. Agar sistem ini bisa bekerja lebih baik, perlu dilakukan otomatisasi yang lebih luas, mengurangi proses manual dalam verifikasi, serta memperbaiki sistem backup dan pemulihan data. Dengan begitu, sistem bisa berjalan lebih lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saran

Agar sistem SIPD Penatausahaan lebih efektif, proses pencatatan dan verifikasi sebaiknya lebih otomatis supaya pekerjaan lebih cepat dan mengurangi kesalahan manusia. Keamanan data juga perlu ditingkatkan dengan sistem backup yang lebih baik agar data tidak mudah hilang. Selain itu, alur kerja bisa disederhanakan supaya pencairan dana dan pelaporan lebih mudah dan efisien. Fitur audit trail juga penting agar setiap aktivitas pengguna bisa tercatat dengan jelas untuk meningkatkan transparansi. Terakhir, pelatihan rutin bagi pengguna perlu dilakukan supaya mereka lebih paham cara menggunakan sistem dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyanto, Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 233–250. <https://doi.org/10.58784/rapi.179>
- Agus Saputra, K., & Sudianing, N. K. (2019). PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *Locus Majalah Ilmiah UNIPAS*, 11. <https://doi.org/10.37637/locus.v11i2.284>
- Angelia, A., Rahmah, N., & Yulianto, A. (2023). AUDIT SISTEM INFORMASI ABSENSI PADA PT. SUNAR REKA ARTHA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 FOCUS DOMAIN MEA. 11(1).
- Ayu Binangkit, C. A., Voutama, A., & Heryana, N. (2023). PEMANFAATAN UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) DALAM PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN SEWA ALAT MUSIK BERBASIS WEBSITE. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(2), 1429–1436. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i2.6858>
- Aziz, A. M. N., Permana, R., Deni, S., Sumarno, T., & Fauzi, T. F. A. (2020). AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA E-LEARNING ARS UNIVERSITY. 4.
- Fhonna, R. P., & Ar, M. (2021). Sistem Informasi Absensi Pegawai Pada Biro Kominfo Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara Berbasis Web.
- Hudin, J. M., Mutiara, E., Ramdhani, L. S., & Saputra, R. A. (2021). AUDIT SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT. INTERCON TERMINAL INDONESIA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1. *Swabumi*, 9(1), 48–56. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v9i1.10310>
- Istighfarin, A., & Priono, H. (2021). PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PENERBITAN SP2D STUDI PADA KASUS BPKAD. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 583–592. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.272>
- Jasmin, M., Ulum, F., & Fadly, M. (2021). ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMASARAN PADA KOMUNITAS BARBERSHOPS MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN DELIVER SERVICE AND SUPPORT (DSS) (Studi Kasus: Kec, Tanjung Bintang). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2, 1–15.
- Muhamad Sidik. (2023). AUDIT SISTEM INFORMASI BERBASIS COBIT 2019

- MENGGUNAKAN STANDAR ISO 27001: 2005. *JURNAL ILMIAH SAINS TEKNOLOGI DAN INFORMASI*, 1(3), 1–13. <https://doi.org/10.59024/jiti.v1i3.192>
- Nurul Wahidah, R., Lutfiyana, N., Fitria Ramadanti, V., Septiyo, P., & Drefiyanto, R. (2022). Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint Pada PT. Metal Castindo Industritama Dengan Menggunakan Framework Cobit 5. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(2), 51–57. <https://doi.org/10.51998/jsi.v11i2.482>
- Rahwanto, E., & Sudaryono. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA PT. INTER ANEKA PLASINDO.
- Ridho, M. R. (2021). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE DENGAN FRAMEWORK CODEIGNITER PADA CV POWERSHOP. 04(02).
- Rizqya, N. (2020). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Laporan Posisi Keuangan Pada UMKM Berbasis WEB (Studi Kasus UMKM Home Catering). *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 19(3). <https://doi.org/10.32409/jikstik.19.3.65>
- Roni Yanto. (2022). Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 36–54. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i2.388>
- Waruwu, W. A., Mendrofa, M. S. D., Waruwu, E., & Gea, J. B. I. J. (2024). Analisis Manajemen Kearsipan Dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 702–715. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3877>.